

**EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
POLITIK DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN
UMUM DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

ANA HASANAH

NIM. 07011381924161

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

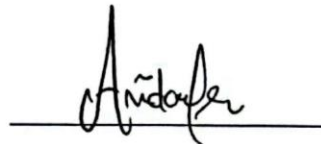
Oleh :

ANA HASANAH
NIM. 07011381924161


Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 08 Januari 2024

Pembimbing

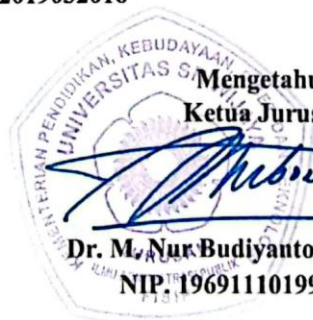
Annada Nasyaya, S.IP., M.SI
NIP. 198809062019032016



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001



HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN **SKRIPSI**

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 12 Januari 2024


Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Annada Nasyaya, S.IP., M.Si

NIP. 198809062019032016


Ketua



Dwi Mirani, S.IP., M.Si

NIP. 19810608 2008122002

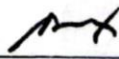
Anggota



Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001

Anggota



Mengetahui,

Dekan Fisip



Prof. Dr. Alfitri, M.Si

NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ana Hasanah
NIM : 07011381924161
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 30 Januari 2002
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik dalam
Menghadapi Pemilihan Umum di Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam kenyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah



Ana Hasanah
NIM. 07011381924161

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“If you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl,
but whatever you do you just have to keep moving forward”*

(Dr. Martin Luther king Jr.)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:


1. Kedua orang tua, Ayah dan Ibuku
2. Teman-teman terbaik seperjuangan
selama perkuliahan
3. Sahabat-sahabat terbaik saya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan pendidikan politik sebagai salah satu fasilitator mengenai pendidikan politik terhadap masyarakat Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi yang terkumpul kemudian diolah dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan objektifitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Provinsi Sumatera Selatan berperan dengan baik dalam menjalankan fungsi pendidikan politik terhadap masyarakat di Sumatera Selatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera selatan dengan mempunyai program setiap tahunnya untuk melaksanakan pendidikan politik melalui kegiatan seminar, penyuluhan dan membuat forum-forum diskusi politik. Namun, diharapkan perlu adanya program lain seperti pemasangan spanduk tentang kesadaran pemilu, sarasehan dan juga diharapkan pendekatan kepada masyarakat khususnya kepada ibu rumah tangga agar semakin meningkat tentang kesadaran untuk mengikuti pemilihan umum.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Pemilu, Kesbangpol

Pembimbing



Annada Nasyaya, S.IP., M.SI
NIP. 198809062019032016

Palembang, 08 Januari 2024
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



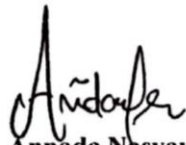
Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This study aims to find out how the National Unity and Political Agency of South Sumatra Province provides political education as one of the facilitators regarding political education for the people of South Sumatra. In this research, the qualitative research type is used. The data collection techniques used in this research are interviews, observations and documentation which are collected and then processed into the main raw material for analyzing empirical conditions and objectivity in the existence of research objectives at the locations studied. The results of this research show that the National Unity and Political Agency of South Sumatra Province plays a good role in carrying out the function of political education for the people of South Sumatra, National Unity and Political Agency of South Sumatra Province has an annual program to carry out political education through seminars, counseling and creating political discussion forums. However, it is hoped that there will be a need for other programs such as putting up banners about election awareness, workshops and it is also hoped that there will be an approach to the community, especially housewives, to increase awareness about participating in the general election.

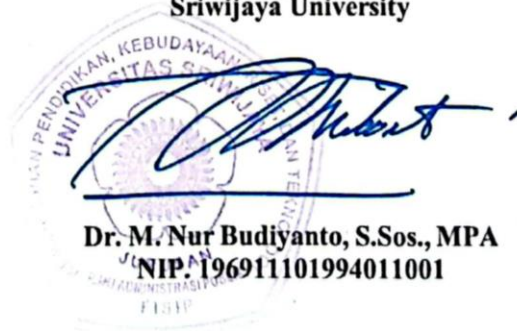
Keywords: Political Education, General elections, National Unity and Politics

Advisor



**Annada Nasyaya, S.IP., M.SI
NIP. 198809062019032016**

**Palembang, 08 January 2024
Chairman of Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani serta memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik dalam Menghadapi Pemilihan Umum di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan”.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Kepala Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya
4. Ibu Annada Nasyaya S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini
5. Ibu Lili Erina, M.si selaku Dosen Pembimbing Akademik selama masa studi dalam perkuliahan
6. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya baik moril maupun materil
7. Seluruh staff dan pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberi data dan bersedia menjadi informan dalam penelitian penulis
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu membantu dan membersamai penulis dalam segala hal selama perkuliahan, Ummulia Zahra Kamila, Nur'aini Prahastuti, Made Sari, Elsa Dini Mahmuda

9. Sahabat-sahabat penulis, Salsabila, Mutiara, Anggita dan Bernica yang selalu memberi dukungan, menyemangati dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini
10. Semua Pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penelitian hingga penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun diharapkan agar penulis dapat memperbaiki kesalahan Skripsi ini untuk kedepannya

Palembang, 05 Januari 2024

Penulis



Ana Hasanah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1 Landasan Teori.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Kebijakan Publik.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Evaluasi Kebijakan	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Pendidikan Politik	Error! Bookmark not defined.
2.2 Model Evaluasi yang digunakan	Error! Bookmark not defined.
2.3 Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
2.4. Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Definisi Konsep.....	Error! Bookmark not defined.

3.3 Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.4 Informan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.7 Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
3.8 Pengabsahan Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.9 Sistematika Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Deskripsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	Error! Bookmark not defined.
4.1.3 Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.4 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	Error! Bookmark not defined.
4.2 Informan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.3 Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.3.1 Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik dalam Menghadapi Pemilihan Umum di Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.....	Error! Bookmark not defined.
4.4 Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
4.4.1 Evaluasi penyelenggaraan pendidikan politik dalam menghadapi pemilihan umum di Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
5.1 Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
5.2 Saran	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA	13
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 1 Instrumen Pedoman Wawancara	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2 Surat Izin Unsri	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 3 Surat Izin Pembimbing Skripsi	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 4 Kartu Pembimbing Skripsi.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 5 Lembar Perbaikan Sidang Skripsi ..	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 6 Surat Pengecekan Similarity	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penyelenggaraan pendidikan politik tahun 2022	9
Tabel 2. Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. Data Informan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5. Susunan Acara Kegiatan Politik dan Etika Budaya Poltik tahun 2022 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Provinsi Sumatera Selatan	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

gambar 1 Peta lokasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	Error! Bookmark not defined.
gambar 2. Struktur organisasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Pollitik Provinsi Sumatera Selatan	Error! Bookmark not defined.
gambar 3. Dokumentasi kegiatan pendidikan politik dalam tema pendidikan politik bagi kelompok entittas untuk mensukseskan pemilu dan pemilihan umum serentak tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
gambar 4. Dokumentasi kegiatan pendidikan politik dalam tema pendidikan poltik dan etika budaya politik bagi pelajar (pemilih pemula) menjelang pemilu serentak tahun 2024	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi, yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki demokrasi konstitusional dan juga merupakan negara hukum seperti yang ada pada pasal 1 UUD 1945 (Noviati, 2013). Dalam berdemokrasi pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945, yang mana negara demokrasi dapat tercapai dikarenakan negara Indonesia bersikap menghargai kewenangan manusia melalui perwakilan suara dari warga negara Indonesia itu sendiri, agar dapat terpilihnya aturan Indonesia dengan baik dan benar (Nurdin and Fatkhuri, 2022). Dengan adanya pemilu dapat terciptanya pemilihan-pemilihan seperti kepala desa maupun pemilihan-pemilihan elit politik lainnya, yang mana rakyat Indonesia dapat dengan sukacita memilih sendiri perwakilan ataupun untuk mewakili rakyat Indonesia di pemerintahan agar dapat mengatur tatanan serta sistem negara Indonesia itu sendiri (Noviati, 2013).

Melaksanakan pemilihan umum sebagai landasan penerapan sistem demokrasi. Pemilihan umum secara menyeluruh mencerminkan kebebasan rakyat, terkhususnya dalam hal penyaluran aspirasi serta hak pemenuhan politik bagi rakyat pemilihan umum juga diharapkan untuk mencerminkan kebebasan rakyat secara menyeluruh, terkhususnya dalam hal penerimaan (Pardede, 2014). Salah satu peran penting dalam berdemokrasi juga adalah pemilihan umum yang biasanya setiap lima tahun sekali terlaksana dan seluruh masyarakat Indonesia ikut berpartisipasi untuk memilih Presiden serta Wakil Presiden dan juga anggota-anggota legislatif pada tingkat daerah maupun tingkat nasional. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila mempunyai peranan paling penting

dalam pemilihan umum agar pemilihan umum dapat dikatakan sebagai pemilihan umum yang baik.(Aldi, Tanbun and Nugraha, 2019). Sikap serta sifat pemilihan umum seperti umum, bebas, asas langsung, rahasia, jujur serta adil hendaknya menjadi dasar dari proses terselenggarakannya pemilihan umum. Sarana legitimasi politik difungsikan sebagai landasan pemilihan umum, metode pergantian kekuasaan atau sirkulasi elit, perwakilan ataupun representasi politik, serta sosialisasi politik yang bersifat massal dan periodik.

Pemilihan umum juga berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik, representasi ataupun perwakilan politik, metode sirkulasi elit atau bergantinya kekuasaan dan juga sebagai sarana pendidikan dan sosialisasi politik yang bersifat massal dan periodik. Kelembagaan penting yang salah satu sistemnya yang dalam sistem demokrasi berfungsi sistem pemilihan umum (Nur Wardhani, 2018). Pemilihan umum yang menjadi instrument langsung untuk masyarakat yang usianya cukup untuk serta keikutsertaan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Proses tahapan pemilihan umum juga antara lain: memastikan daftar pemilih, kemudian ke tahap pencalonan kandidat, lanjut ke tahap pemungutan dan juga penghitungan suara, dan terakhir yang paling penting yaitu hasil perolehan suara yang kemudian dari itu kita dapat menentukan kandidat yang akhirnya terpilih (Cholisin, 2000: 47). Kondisi lembaga-lembaga politik sebagai sudut pandang penilaian untuk sistem pemilihan umum. Proses pemungutan suara, tata cara pemilihan, tingkah laku masyarakat dalam memilih serta proses pemilihan kepala daerah, partisipasi atau keikutsertaan perempuan dalam partai politik, pendapat masyarakat mengenai demokrasi dan masalah-masalah baru yang dapat muncul dalam proses pemilihan umum (Arniti, 2020). Sistem pelaksanaan pemilihan umum saat ini dalam melaksanakan proses pemungutan suara memerlukan informasi

serta tata cara mengikuti pemilihan umum yang bisa berdampak kepada banyak masyarakat melalui pemilihan kepala daerah, sehingga diperlukannya merencanakan Kendala-kendala dalam pelaksanaan pemilihan umum masih banyak dihadapi masyarakat Indonesia pada saat pelaksanaannya, namun masyarakat juga sudah mampu mengikuti jalannya proses serta menghargai hasil Keputusan pemilihan umum. Pemilihan kepala daerah menjadi proses-proses utama serta pemberian informasi kepada masyarakat menjadi kendala utama atau penghambat pemilihan umum (Mustofa, 2000).

Proses pendidikan sebagai pemberian proses pemilihan umum yang juga memperhatikan latar belakang yang dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat Indonesia agar informasi dapat tersampaikan secara menyeluruh, termasuk juga siswa usia sekolah notabennanya yang merupakan pemilih pemula (Nurdin and Fatkhuri, 2022). Dalam negara demokrasi partisipasi politik yang merupakan penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang sebagai indikator implementasinya yang secara sah atau benar dipilih oleh seluruh masyarakat yang telah mencukupi usia yang dilakukannya dengan melibatkan mereka dalam pesta demokrasi pemilihan umum ini. Tingkat partisipasi politik yang makin tinggi yang menandakan bahwa rakyat telah memahami, mengikuti, serta menyertakan diri dalam kegiatan kenegaraan dan juga sebaliknya jika rendahnya partisipasi politik itu menunjukkan bahwa rakyat kurang menaruh minat ataupun apresiasi terhadap kegiatan kenegaraan ini (Pattipeilohy, Yusuf and Handayani, 2018). Salah satu tanda bahwa partisipasi politik rendah yaitu dengan adanya golongan putih (golput). Maka dari itu, partisipasi politik dalam pemilihan umum yang dipilih oleh masyarakat merupakan salah satu peran utama yang harus dilihat kembali, karena baik itu tinggi maupun rendahnya partisipasi dalam politik merupakan sinyal yang

juga indikator yang menjadi faktor paling utama terhadap jalannya pelaksanaan proses demokrasi (Priandi and Roisah, 2019).

Masyarakat Indonesia dapat melihat kehidupan pribadi yang baik dari para calon legislatif itu sendiri, masyarakat sendiri juga dapat melihat secara menyeluruh bagaimana kinerja para partai politik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat (1) yaitu bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibangun oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan tujuan dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Partai politik juga memerlukan visi, misi dan tujuan yang baik agar mendapatkan simpati dari masyarakat, yang berasal tulus dari pribadi bukan hanya semata-mata harapan dari partainya saja. Memiliki calon legislatif dari partai politik yang sebaiknya figur yang diinginkan oleh masyarakat dan juga dicintai masyarakat. Dengan memiliki figur dari partai yang dicintai oleh masyarakat tentu saja tidak bisa didapatkan secara instan, melalui pendidikan politik dapat menjadi salah satu caranya (Marianata, Sujarwati and Syafryadin, 2022).

Membangun dan mengembangkan penyesuaian politik dalam diri seorang individu dengan cara seperti keyakinan konsep yang merupakan sederet aktifitas dari pengaruh penerapan pendidikan politik, untuk menggerakkan seseorang untuk memiliki kesadaran terhadap persoalan politik serta munculnya sikap politik dengan melalui pengetahuan politik maupun mempunyai serta memahami wawasan tentang politik yang bermuatan politis. (Firmansyah and Kariyani, 2021). Dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dikatakan bahwa lembaga pendidikan politik merupakan salah satu point utama dalam partai politik yang mana memiliki tiga fungsi, yaitu dengan adanya kader kepemimpinan nasional dari legislative maupun eksekutif, menyampaikan serta mendengarkan aspirasi atau pendapat masyarakat, dan juga tentu saja yang paling penting ialah dengan dijalankannya atau dengan penerapan pendidikan politik. Proses pembelajaran mengenai hak, kewajiban serta tanggung jawab setiap individu warga negara merupakan suatu proses pembelajaran ataupun pemahaman dalam pendidikan politik yang diterapkan agar dapat menjadi kehidupan yang berbangsa dan bernegara.

Pendidikan politik yang diterapkan atau yang diajari oleh partai politik kepada masyarakat salah satunya ialah mengenai bagaimana strategi dalam memilih calon legislatif dalam pemilihan umum. Partai politik melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat seperti tentang bagaimana rencana memustuskan calon legislatif di dalam pemilu. Namun, pada saat kejadian sebenarnya yang ada dilapangan partai politik itu sendiri masih banyak ditemukan di dalam masyarakat dengan melakukan atau berpolitik dengan "*money politic*" atau yang sering kita kenal dengan politik uang (Anggraeni and Ramdhani, 2018). Dalam menjelang hari-hari pemilihan umum pasti masih sering terdengarnya istilah "serangan fajar", para politisi nakal atau simpatisan partai ini yang biasanya menjalan kegiatan dengan istilah serangan fajar ini, Kerap kali kita menemukan istilah "serangan fajar" yang akan datang hari-hari pemilihan umum. Serangan fajar dilangsungkan oleh para politisi nakal atau simpatisan partai, melewati masyarakat dengan membagi-bagiakn uang supaya masyarakat memutuskan untuk memilih calon tertentu, karena kurangnya informasi serta pengetahuan masyarakat mengenai aturan-aturan

yang ada dalam pemilu hal ini dapat atau bahkan masih sering terjadi, maka dengan ini masih sangat-sangat perlu pelaksanaan pendidikan politik dikarenakan tidak ingin hal-hal seperti ini terjadi kembali.

Menurut Kartono (dalam Handoyo dan Puji Lestari, 2017) mengatakan bahwa, “Pendidikan politik adalah generasai muda yang diarahkan untuk menjadi kader-kader politik agar berkompetensi, memahami serta dapat memenangkan kegiatan politik yang awal mulanya pendidikan ini diberikan pada orang dewasa” Pendidikan terstruktur bagi setiap individu perseorangan agar menjadi kepribadian politik yang baik, juga memiliki kesadaran politik yang tinggi, dan dapat bertanggung jawab serta ikut berpartisipasi baik itu moral maupun etis agar tercapainya tujuan masyarakat dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana ini merupakan pengertian ataupun pemahanan mengenai pendidikan politik.

Pemanfaatan media sosial dalam menerapkan pendidikan politik yang juga dapat menjadi sarana yang bisa dijadikan tempat menyebarkan informasi-informasi penting dalam pelaksanaan pemilu. Namun, pemanfaatan media sosial untuk menjadi sarana pendidikan politik ini juga menjadi sebuah kekhawatiran yang jika tidak diawasi malah akan menjadikan tempat penyebaran hoaks ataupun ujaran kebencian yang akan berpengaruh terhadap calon legislatif tertentu (Rojabiaturohmah and Pujianti, 2020). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang pendidikan politik yang terfokuskan pada perekat persatuan dan kesatuan bangsa ialah merupakan salah satu pentingnya dari adanya pendidikan politik. Pendidikan politik yang berhasil serta demokrasi masyarakat yang sehat dapat dilihat melalui komunikasi politik yang baik yang saling mendukung dan bukan menajdi tempat atau ajang saling sindir-menyindir satu sama lain antar elit politik. Tindakan yang seperti inilah yang biasanya dapat memecah belah

masyarakat yang dapat berpengaruh kepada kegagalan dari pelaksanaan pendidikan politik, yang mana Tindakan-tindakan seperti ini harus kita hilangkan (Sanusi and Darmawan, 2016).

Pemerintah menuturkan Permendagri No 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik sebagai peran penting yang menyelenggarakan dengan mengakomodasikan pendidikan politik. Pada Permendagri No 36 Th 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik yang menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mengusahakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban dalam membangun kehidupan berdemokrasi;
- b. Bahwa untuk diperlukannya pendidikan politik bagi masyarakat untuk pengembangan kehidupan berdemokrasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Berkenaan dengan sasaran atau tujuan pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik pada Pasal 2, yaitu:

- a. Memberikan arahan atau saran kepada pemerintah daerah dalam menghibahkan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik;
- b. Memberikan kemudahan bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, partai politik lokal, lembaga nirlaba lainnya, serta lembaga ataupun instansi yang ada didalam daerah mengakses jalur-jalur yang terikat penyelenggaraan pendidikan politik di daerah.

Adapun target atau tujuan dari fasilitasi pelaksanaan dengan diselenggarakannya pendidikan politik pada Pasal 3 yaitu :

- a. Meningkatkan serta membangunkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, serta agar tercapainya prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan;
- c. Meningkatkan ataupun mengembangkan karakter bangsa yang selaras dengan budaya dan sejarah bangsa.

Masyarakat dapat saling menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa yang dapat dididik melalui pendidikan politik. Mendidik masyarakat menjadi masyarakat yang beradab dengan cara yang etis yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan juga dapat menarik simpati masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan lapang dada atau ikhlas menerima kekalahan maupun kemenangan dari calon legislatif setelah pemilihan umum selesai (Chakim, 2016). Penyelenggaraan pendidikan politik yang diharapkan dalam menghadapi pemilihan umum ini dapat menjadi acuan atau panduan agar menjadi pemilihan umum yang baik dan juga bersih, serta penyelenggaraan politik di Provinsi Sumatera Selatan dapat diperbaiki lagi untuk hal-hal yang masih belum terselenggara atau belum terlaksana. Terhususnya generasi muda dari siswa sekolah yang tergolong pemilih pemula dan pendidikan politik yang masih diperlukannya dan yang bisa berpengaruh pada pengetahuan ataupun pemahaman mengenai hak, kewajiban serta keikutsertaannya dalam pemilihan umum yang mana masing-masing seorang individu mempunyai tanggung jawab dalam berkehidupan bernegara dan berbangsa (Marianata, Sujarwati and Syafryadin, 2022).

Hal penting dalam pembangunan demokrasi dan politik yang menjadikan pemerintah agar terus mengupayakan agar menjadikannya lebih baik. Dalam penyelenggaraan pendidikan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sumatera Selatan yang sasaran utama yaitu siswa menengah atas maupun mahasiswa yang mana tergolong dalam pemilih pemula yang menjadi sasaran utama dalam pendidikan politik, maka dari itu penyelenggaraan ini banyak dditujukan serta dihadiri oleh peserta dari sekolah menengah atas dan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu pendidikan politik yang diselenggarakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Kegiatan pendidikan politik pada tahun 2022 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumsel

No	Nama Kegiatan	Waktu Kegiatan	Peserta
1	Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik Tahun 2022 bagi Generasi Muda khususnya Pelajar	20 Juni 2022	Peserta lebih kurang 100 (seratus) orang adalah yang terdiri dari pelajar siswa dan Siswi SMA/MA Kota Palembang.
2	Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik Tahun 2022 bagi pelajar siswa/siswi SMK	24 Agustus 2022	Peserta kurang lebih 100 (seratus) orang yang berasal dari perwakilan pelajar SMK dan guru pendamping di kota Palembang.
3	Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik bagi Kaum Perempuan	09 September 2022	Peserta kurang lebih 100 (seratus) orang yang berasal dari elemen Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Sumatera Selatan (BKOW), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Palembang, Dharma

			Wanita Persatuan Bankesbangpol Prov. Sumsel serta staf Bankesbangpol Prov. Sumsel.
4	Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik bagi Santri dan Remaja Masjid	26 September 2022	Peserta kurang lebih 100 (seratus) orang perwakilan santri dan pemuda masjid yang tergabung dalam Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.

Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Pendidikan Politik Bidang IV Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan dari tabel diatas, pelaksanaan pendidikan politik tahun 2022 dapat dilihat bahwa peserta yang menjadi perwakilan serta hadir yang mewakili hanya berada di Kota Palembang saja. Sementara itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi memiliki kewajiban serta hak dan wewenang dalam pelaksanaan pendidikan politik untuk dan di semua daerah kabupaten maupun kota yang ada di dalam kawasan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi dengan ini diharapkan agar “Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik dalam Menghadapi Pemilihan Umum di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan” dapat menjadi acuan ataupun referensi yang berfungsi sebagai penutup kelemahan ataupun kekurangan serta yang mulanya belum dilaksanakan dapat terlaksana dan membenahi hal-hal yang belum baik di Provinsi Sumatera Selatan. Terkhususnya untuk kelompok pemilih pemula yang dimana generasi muda termasuk didalamnya, yang masih benar-benar memerlukan banyak mengenai pemahaman pendidikan politik yang dapat berpengaruh pada pengetahuan mengenai hak dan kewajiban serta keikutsertaannya dalam suatu pemilihan dan masing-masing individu yang

mempunyai tanggung jawab bagi setiap warga negara yang bernegara dan berbangsa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu “Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik dalam Menghadapi Pemilihan Umum di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik dalam Menghadapi Pemilihan Umum di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah

1 Manfaat teoritis

Dalam manfaat teoritis yaitu diharapkan agar bisa memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya terkhusus Ilmu Administrasi Publik dan juga agar dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan ataupun referensi untuk mengembangkan ilmu administrasi publik dalam menganalisis evaluasi kebijakan.

2 Manfaat praktis

- a. Sebagai bahan referensi ataupun acuan bagi studi lanjutan maupun studi-studi lain yang meneliti mengenai evaluasi penyelenggaraan pendidikan politik.

- b. Sebagai bahan rekomendasi untuk tiap lembaga-lembaga maupun aktor-aktor kebijakan publik dalam evaluasi penyelenggaraan pendidikan politik khususnya di Provinsi Sumatera Selatan

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, J.A., Tanbun, E.P. and Nugraha, X. (2019) 'Tinjauan Yuridis Kewenangan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menciptakan Pemilu yang Demokratis di Indonesia', *DE RECHTSSTAAT*, 5(2), pp. 137–103. Available at: <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.1941>.
- Anggraeni, L. and Ramdhani, H. (2018) 'Pencegahan Money Politic Dalam Pemilihan Umum Melalui Penguatan Kebijakan Non Penal', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), p. 59. Available at: <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i1.13660>.
- Arniti, N.K. (2020) 'Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), p. 329. Available at: <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>.
- Chakim, M.L. (2016) 'Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik', *Jurnal Konstitusi*, 11(2), p. 393. Available at: <https://doi.org/10.31078/jk11210>.
- Firmansyah, J. and Kariyani, L.N. (2021) 'Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(4). Available at: <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2534>.
- Hardian, M. *et al.* (2021) 'Gagasan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda (Sebuah Kajian Literatur)', *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 6(3), p. 552. Available at: <https://doi.org/10.28926/briliant.v6i3.653>.
- Marianata, A., Sujarwati, I. and Syafryadin, S. (2022) 'Memberikan Pendidikan Politik Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Bengkulu', *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Pendidikan*, 2(2), pp. 125–133. Available at: <https://doi.org/10.33369/jurnalinovasi.v2i2.21256>.
- Nur Wardhani, P.S. (2018) 'Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum', *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), p. 57. Available at: <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>.

- Nurdin, N. and Fatkhuri, F. (2022) 'Pelatihan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan Kader Partai Politik Perempuan di Provinsi DKI Jakarta', *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), pp. 539–549. Available at: <https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i4.209>.
- Pardede, M. (2014) 'Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1), p. 85. Available at: <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58>.
- Pattipeilohy, A., Yusuf, N. and Handayani, T. (2018) 'Analisis Dampak Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di SMAN Balauring Lembata NTT', *Jurnal Civic Hukum*, 3(2), p. 128. Available at: <https://doi.org/10.22219/jch.v3i2.8653>.
- Priandi, R. and Roisah, K. (2019) 'Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), pp. 106–116. Available at: <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>.
- Rahman, A. (2018) 'Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan', *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), p. 44. Available at: <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8385>.
- Sanusi, A.R. and Darmawan, C. (2016) 'Implementasi Pendidikan Politik Dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya Pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila (Studi Deskriptif terhadap Organisasi Kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat)', *JURNAL PENDIDIKAN ILMU SOSIAL*, 25(1), p. 24. Available at: <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i1.3668>.
- Supratiwi, S. *et al.* (2021) 'Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Mahasiswa Pada Pilkada Serentak', *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 2(1). Available at: <https://doi.org/10.14710/jpv.2021.9583>.

